

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	B. BUANA	6	31-7-02

Komisi I: Keppres Pengerukan Pasir Laut Merusak Lingkungan

Jakarta, Buana

Belum juga panjang umur Keppres No 33 tahun 2002, akhirnya terbukti bahwa pembebasan pengerukan dan penjualan pasir laut membawa masalah. Untuk itu, sejumlah anggota Komisi I DPR mendesak pemerintah segera mencabut Keppres tersebut. Selain menimbulkan dilema bagi aparat di lapangan untuk memberantas penyelundupan pasir laut, Keppres itu juga terbukti berdampak serius bagi kerusakan lingkungan.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR, Abdul Wahid Aziz Bisri (Gus Wahid) di Jakarta, Selasa (30/7) pada jumpa pers dalam rangka mensosialisasikan hasil kunjungan kerja (kunker) tim Komisi I ke Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang dan Singapura, 22-25 Juli lalu. Selain Gus Wahid, hadir Wakil Ketua Komisi I, Isaac Latuconsina, Djoko Susilo, Franky Kayhatu dan Achmad Soemargono.

Menurut Gus Wahid, aparat di Riau menghadapi dilema dalam memberantas aksi penyelundupan pasir. "Aparat kita yang sudah menangkap mereka menghadapi dilema bahwa ada perizinan-perizinan pengerukan pasir yang datang dari pusat, misalnya dari Departemen Kelautan dan lain sebagainya," katanya.

Karena itulah, lanjutnya, berdasarkan suara-suara yang berkembang di sana, ada keinginan agar penjualan dan pengerukan pasir laut itu distop saja perizinannya. "Karena untuk tanah se-jengkal saja, kadang satu negara berperang dengan negara lain. Tetapi kita malah sudah menjual sebagian tanah air kita berupa pasir-pasir itu. Jadi, ini bukan hanya masalah yang terkait dengan kerusakan lingkungan saja, tapi juga sudah menyangkut integritas kebangsaan kita," ujarnya.

Menurut Gus Wahid, adalah ke-

pentingan semua pihak untuk menghentikan penjualan pasir oleh siapa-pun, baik oleh Pemda maupun pemerintah pusat. "Jadi, kita mendesak agar perizinan pengerukan pasir itu distop meski Keppres ini masih baru, yaitu tahun 2002. Tetapi saya pikir ini bukan hanya masalah Keppres atau apa, tetapi sudah menyangkut masalah krusial bangsa," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Abdul Wahid juga mensinyalir masih adanya ketidaksinkronan di tubuh pemerintah soal pengerukan pasir laut ini. "Karena itulah, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kita untuk cepat melakukan sinkronisasi. Sebab, kalau tidak, kejadian-kejadian ini akan terus-menerus terjadi," tandasnya.

Aspirasi Masyarakat

Gus Wahid juga menyatakan, desakan Komisi I tersebut sekaligus sebagai perwujudan aspirasi luas dari dia-

log dengan masyarakat di Kepulauan Riau maupun Riau Daratan. "Kesimpulannya, ini memang harus distop. Karena terbukti aturan yang ada selama ini tak bisa berjalan dengan baik. Akibatnya, lingkungan kita hancur dan Singapura diuntungkan dengan penambahan teritorialnya sepanjang ratusan kilometer. Ini akan menimbulkan persoalan serius mengenai perbatasan kelautan kita," jelasnya.

Sementara itu, Isaac Latuconsina selaku ketua rombongan Komisi I dalam kunker ke Riau itu menjelaskan, DPR minta agar pemerintah pusat segera melakukan penertiban dalam soal pengerukan pasir laut itu. "Dan kalau memang tidak dapat diamankan dengan baik, ya lebih baik izin (pengerukan pasir laut) itu distop saja," tegas Isaac.

Isaac juga meluruskan pemberitaan bahwa pihak TNI AL telah melepaskan tujuh kapal pengeruk pasir laut yang di-

tangkap pada 25-26 Juli lalu. "Saya sudah konfirmasi ke Danlanal (Komandan Pangkalan AL) dan memperoleh informasi kapal-kapal itu belum dilepas," katanya. Lima dari tujuh kapal itu, jelas Isaac, adalah kapal berbendera Rusia, Korsel, Belanda, Jepang dan Luxemburg, tetapi dioperasikan oleh para pengusaha pengerukan pasir lokal.

Sehubungan dengan tertangkapnya kapal-kapal pengeruk pasir yang beroperasi tanpa izin itu, Isaac menyatakan, Komisi I DPR memberikan dukungan pada aparat keamanan, khususnya TNI AL dalam melakukan tindakan tegas terhadap kasus pengerukan pasir itu. "Komisi I meminta agar proses hukum dijalankan secara konsisten agar wibawa hukum dan aparat keamanan semakin dapat ditingkatkan dan kerugian negara dapat dikurangi," tegas anggota DPR dari F-TNI/Polri ini.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Riau, A Chaidir yang dikonfirmasi Buana membenarkan bahwa apa yang dikemukakan DPR itu adalah aspirasi masyarakat Riau. "Dan saya mendukung jika memang DPR mengusulkan pada pemerintah pusat untuk menyetop pengerukan pasir laut serta mencabut Keppres yang terkait dengan izin ekspor pasir laut itu," tegas Chaidir, seraya menyebut keberadaan Keppres 33/2002 tidak diikuti dengan *law enforcement* yang baik.

"Selama ini kapal pengeruk itu mengeruk pasir di mana-mana tanpa mengindahkan aturan yang berlaku. Akibatnya, hasil pengerukan pasir itu tidak mendatangkan keuntungan rakyat, malah merugikan," katanya. Dia mencontohkan kondisi masyarakat di Tanjung Batu Kabupaten Karimun yang kini tidak bisa lagi menangkap ikan karena lingkungan lautnya rusak akibat pengerukan. "Aparat memang menangkap sejumlah pelaku, tapi kemudian dilepas kembali," paparnya. □ mad